

## Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Sanksi Perpajakan sebagai Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ani Nuraeni<sup>1\*</sup>, Ade Sudarma<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

E-mail: [aninuraeni744@gmail.com](mailto:aninuraeni744@gmail.com) <sup>1\*)</sup>  
[adesudarma@ummi.ac.id](mailto:adesudarma@ummi.ac.id) <sup>2)</sup>

### ARTICLE INFO

Article history:  
Received 10 Desember  
2025  
Received in Revised 30  
Januari 2026  
Accepted 30 Mei 2026

Keyword's : Modern Tax  
Administration System,  
Tax Sanction, Taxpayer  
Compliance

### ABSTRACT

*This study aims to determine and explain the modern tax administration system and tax sanctions affect the Compliance of Motorized Vehicle Taxpayers at the Samsat Office of Sukabumi Regency. The results of testing the hypothesis using the t-test variable  $X_1$  show that the significance value is  $0.001 < 0.05$ , then this shows that  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected, the t-test variable  $X_2$  shows that the significance value is  $0.228 > 0.05$ , so this shows that  $H_o$  is accepted and  $H_a$  is rejected, therefore the modern tax administration system has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance while tax sanctions do not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Samsat office in Sukabumi district. The results of the F test show that the significance value is  $0.002 < 0.05$ , which means that  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected. It can be concluded that the independent variables simultaneously have a significant effect on the compliance variable. The test results for the coefficient of determination show a result of 0.123 or 12.3%, which means that the X variable affects the Y variable by 12.3% while 88.7% is influenced by other factors that are not present in this study.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sukabumi. Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t variabel  $X_1$  menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka ini menunjukkan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, uji t variabel  $X_2$  menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,228 > 0,05$  maka ini menunjukkan  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak, maka dari itu sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paja kendaraan bermotor sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten sukabumi. Hasil dari uji F diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$  yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak maka, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil 0,123 atau 12,3% yang berarti variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 12,3% sementara 88,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dipenelitian ini.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: [aninuraeni744@gmail.com](mailto:aninuraeni744@gmail.com)

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance. 2829-4807

## PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan pemasukan negara yang dihasilkan oleh pemerintah untuk membiayai dan melaksanakan berbagai program pemerintah, sumber penerimaan berasal dari berbagai sektor salah satunya sektor pajak yang cukup besar. Penerimaan sektor pajak dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi negara yang membiayai ekonomi sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajaknya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendanaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kewajiban pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat, Tim Pembina Samsat bersama instansi terkait memperkenalkan sistem baru dalam membayar pajak melalui reformasi perpajakan. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern yang cepat, mudah dan praktis diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi birokrasi (Pratiwi & Irawan, 2018)

Berdasarkan data kantor Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi, adapun jumlah target dan realisasi kendaraan bermotor tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Laporan Realisasi PKB**

Tahun	Target Pemerintah	Pendapatan PKB	Persentase PKB
2019	125.994.00.000	129.301.874.100	103%
2020	175.180.192.000	117.778.173.300	67%
2021	122.644.780.000	127.408.845.800	104%
2022	131.889.344.000	117.708.274.100	89%

**Sumber : Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi**

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Cibadak Kabupaten Sukabumi masih belum konsisten di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2021 Realisasi Melebihi Target Pemerintah, tetapi Tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan yang cukup tinggi dikarenakan masih terdapat keraguan wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya. Data menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar yang membuat kepatuhan wajib pajak dipertanyakan. Maka dari itu, perlu ada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri.

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu dengan berupa pengenaan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor kepada wajib

pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor membuat proses pemungutan pajak menjadi tidak optimal. Hal ini disebabkan banyak faktor seperti kurangnya pelayanan yang diberikan, sikap acuh tak acuh wajib pajak, antrian panjang yang melelahkan wajib pajak, jarak yang terlalu jauh ke kantor samsat, dan adanya calo sehingga membuat pembayaran pajak lebih dari yang seharusnya dibayarkan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Reformasi Perpajakan**

Direktorat Jendrak Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (tax reform). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang yaitu reformasi dibidang kebijakan dan reformasi di bidang perpajakan. Reformasi di bidang administrasi melalui program administrasi perpajakan modern.

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Berdasarkan kebijakan Direktorat Jendral Pajak yang melakukan perubahan dalam sistem administrasi perpajakan yaitu dengan melakukan modernisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan proses perpajakannya.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan publik yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang terdiri dari berbagai instansi seperti Bapenda, Polri, JasaRaharja, dan Bank BJB. Langkah-langkah yang diambil untuk memodernisasi administrasi perpajakan. Bentuk sistem pajak modern adalah E-Samsat, Samsat keliling, Samsat Masuk Desa dan Samsat Gendong yang merupakan aternatif layanan untuk pembayaran pajak kendaraan dan kualitas pelayanan samsat yang baik. Sistem ini mengikuti reformasi pajak daerah dalam penerapannya yang mengupayakan proses administrasi yang cepat, sederhana, adil, efisien dan efektif.

Sanksi perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan kenaikan biaya pajak. Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga ditunjukkan bagi wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Ketika wajib pajak mengetahui sanksi yang terdapat dalam undang-undang dan petugas pajak menerapkan sanksi tersebut, maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kepatuhan wajib pajak adalah tugas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan. Kepatuhan perpajakan meliputi menghitung jumlah pajak, melaporkan dan membayar pajak dan mematuhi semua peraturan perpajakan lainnya. Dalam hal pajak kendaraan bermotor, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat diukur dari seberapa teliti wajib pajak telah memenuhi perpajakannya dalam jangka waktu tertentu. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berbasis e-samsat, samsat keliling, samsat masuk desa dan samsat gendong yang membuat layanan perpajakan menjadi lebih baik karena prosesnya pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih efektif dan efisien dan penerapan sanksi perpajakan yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila kedua faktor tersebut dijalankan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sukabumi. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Sukabumi. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, yaitu memilih responden yang ditemui secara langsung pada saat penelitian berlangsung dan bersedia mengisi kuesioner. Berdasarkan teknik tersebut, diperoleh sebanyak 100 responden yang dijadikan sampel penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 27 for Windows. Tahap awal meliputi pengujian instrumen penelitian melalui uji validitas dan uji

reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap indikator penelitian layak digunakan. Selanjutnya dilakukan uji normalitas sebagai pengujian asumsi dasar sebelum analisis regresi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terakhir, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas**

Hasil dari pengujian validitas untuk variabel  $X_1$  yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern, diketahui nilai  $r$  hitung untuk pertanyaan yang diberikan kepada 100 responden, menunjukkan bahwa hasilnya valid yaitu  $r$ -hitung lebih besar dari pada  $r$ -tabel 0,1966 dengan menunjukkan hasil uji pertanyaan 1 sebesar 0,772, pertanyaan 2 menunjukkan hasil sebesar 0,828, pertanyaan 3 menunjukkan hasil sebesar 0,831, pertanyaan 4 menunjukkan hasil sebesar 0,746, pertanyaan 5 menunjukkan hasil sebesar 0,840 dan pertanyaan 6 menunjukkan hasil sebesar 0,520. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan variabel ( $X_1$ ) yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dari pernyataan no 1-8 valid.

Hasil dari pengujian validitas untuk variabel  $X_2$  yaitu Sanksi Perpajakan, diketahui nilai  $r$  hitung untuk pernyataan yang diberikan kepada 100 responden, menunjukkan bahwa hasilnya valid yaitu  $r$ -hitung lebih besar dari  $r$ -tabel 0,1996 dengan menunjukkan hasil pernyataan 1 sebesar 0,653, pernyataan 2 menunjukkan hasil sebesar 0,739, pernyataan 3 menunjukkan hasil sebesar 0,726, pernyataan 4 menunjukkan hasil sebesar 0,747, pernyataan 5 menunjukkan hasil sebesar 0,744 dan pernyataan 6 menunjukkan hasil sebesar 0,645. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan variabel ( $X_2$ ) yaitu Sanksi Perpajakan, dari pernyataan no 1-8 valid.

Hasil dari pengujian validitas untuk variabel  $Y$  yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diketahui nilai  $r$ -hitung untuk pernyataan yang diberikan kepada 100 responden, menunjukkan bahwa hasilnya valid yaitu  $r$ -hitung lebih besar dari  $r$ -tabel 0,1966 dengan menunjukkan hasil pernyataan 1 sebesar 0,575, pernyataan 2 menunjukkan hasil sebesar 0,754, hasil pernyataan 3 menunjukkan hasil sebesar 0,771, hasil pernyataan 4 menunjukkan hasil 0,738, pernyataan 5 menunjukkan hasil 0,593, dan pernyataan 6 menunjukkan hasil sebesar 0,593. Dari hasil tersebut

menunjukkan bahwa variabel (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dari pernyataan 1-8 valid.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,846	6

**Sumber: Data Diolah menggunakan IBM SPSS 25, 2023**

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji reliabilitas variabel X1 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,846 yaitu lebih besar dari 0,60. Maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliable.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,802	6

**Sumber: Data Diolah menggunakan IBM SPSS 25, 2023**

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji reliabilitas Variabel X<sub>2</sub> menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,802 yaitu lebih besar dari 0,60. Maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliable.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,766	6

**Sumber: Data Diolah menggunakan IBM SPSS 25, 2023**

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji reliabilitas Variabel Y menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,766 yaitu lebih besar dari 0,60. Maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliable.

### Uji Normalitas

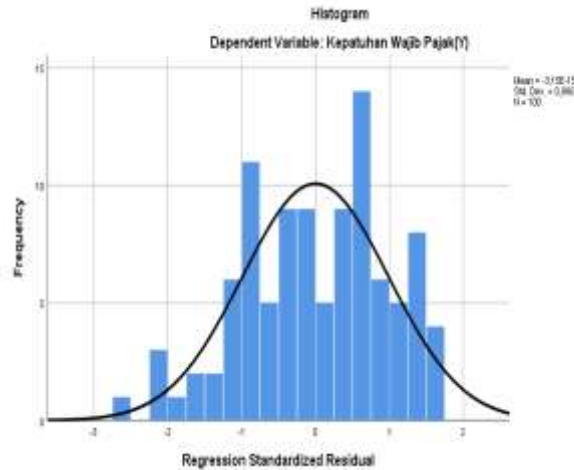
**Tabel 5. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y
N		100	100	100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3,0906	3,2244	3,3742
	Std. Deviation	,70978	,64800	,63896
Most Extreme Differences	Absolute	,088	,083	,071
	Positive	,067	,075	,071

	Negative	-,088	-,083	-,065
Test Statistic		,088	,083	,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055 <sup>c</sup>	,090 <sup>c</sup>	,200 <sup>c,d</sup>

**Sumber : Data Diolah dengan menggunakan IBM SPSS, 2023**

Dari hasil pengujian one sampel kolmogorov-smirnov test pada tabel 5 diatas maka diketahui bahwa nilai signifikan semua variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan Y berdistribusi normal.



**Gambar 1. Grafik Skewness**

Berdasarkan dari data normalitas di atas, dapat terlihat bahwa grafik pada histogram terdistribusi mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak condong (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan sehingga bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,057	2,268		5,756	,000
	X <sub>1</sub>	,223	,064	,330	3,471	,001
	X <sub>2</sub>	,086	,071	,115	1,214	,228

a. Dependent Variable: Y

**Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS, 2023**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

$$Y = 13,057 + 0,223 + 0,88 \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- X<sub>1</sub> = Sistem Administrasi Perpajakan Modern
- X<sub>2</sub> = Sanksi Perpajakan

- A = Konstanta, nilai Y jika X : 0  
 B = Koefisien linier berganda

Berdasarkan hasil dari pengujian tersebut terlihat bahwa koefisien regresi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern ( $X_1$ ) sebesar 0,223 menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar, 0,088 menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Uji Hipotesis

#### Uji T (Parsial)

**Tabel 7. Uji T**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13,057	2,268		5,756	,000
	$X_1$	,223	,064	,330	3,471	,001
	$X_2$	,086	,071	,115	1,214	,228

a. Dependent Variable: Y

**Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS, 2023**

Berdasarkan tabel 7 diatas, diperoleh Sig. atau signifikansi Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern ( $X_1$ ) sebesar 0,001 yang artinya signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Maka keputusan dalam penelitian ini  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Sehingga terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan nilai Sig. Atau signifikansi variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,228 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka keputusan dalam penelitian ini  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga tidak terdapat pengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### Uji F (Simultan)

**Tabel 8. Hasil Uji F**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138,834	2	69,417	6,797	,002 <sup>b</sup>
	Residual	990,606	97	10,212		
	Total	1129,440	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant),  $X_2$ ,  $X_1$

**Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS, 2023**

Tabel diatas menunjukkan bahwa perhitungan didapatkan dari hasil fhitung variabel sistem administrasi perpajakan modern ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,002 maka nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka membuktikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga variabel sistem administrasi perpajak modern ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,351 <sup>a</sup>	,123	,105	3,19569

a. Predictors: (Constant),  $X_2$ ,  $X_1$

Sumber : Data diolah menggunakan IBM SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 9 diatas, dihasilkan perhitungan uji koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi berupa R Square sebesar 0,122 atau sama dengan 12,2%. Angka tersebut memiliki arti bahwa pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 12,2%, sedangkan 0,886 atau 88,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi penelitian ini, atau faktor lain yang tidak diteliti.

### Pembahasan

#### **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) secara Parsial. Berdasarkan hasil uji t diatas, variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern ditemukan bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) secara Parsial. Berdasarkan hasil uji t diatas, variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern ditemukan bahwa nilai signifikan sebesar 0,317 lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi.

## **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ) secara Simultan. Berdasarkan hasil penelitian diatas membuktikan bahwa nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ , maka  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak. Yang artinya bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk lebih mengetahui seberapa besar kontribusi variabel sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dapat diwakili dengan hasil uji koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi yang dinotasikan dalam R yaitu 0,122 atau 12,2% yang artinya bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan 0,878 atau 88,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan administrasi perpajakan berbasis modern, seperti kemudahan layanan, digitalisasi, dan efisiensi proses administrasi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi belum menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk patuh, sehingga peningkatan kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan. Secara simultan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

Bagi instansi pengelola SAMSAT, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan modern melalui optimalisasi layanan berbasis digital, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak agar tingkat kepatuhan dapat terus meningkat. Selain itu, sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan

pemanfaatan layanan elektronik perlu diperluas agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajibannya.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan wilayah penelitian yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, literasi perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, insentif perpajakan, maupun penggunaan layanan digital (e-Samsat). Selain itu, penggunaan metode penelitian yang lebih beragam, seperti pendekatan mixed methods atau Structural Equation Modeling (SEM), dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajar, B., Metodologi, P., Bagi, P., Akuntansi, M., Wijayanti, R., Paramita, D., Rizal, M. M. N., Riza, C., & Sulistyan, B. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.
- Amalia, S., Zanaria, Y., & Febri Darmayanti, E. (2026). Peran Relawan Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 166-175. Retrieved from <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive/article/view/12102>.
- Arifin, L., Saputra, P. P., & Rianto, R. (2022). The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Bekasi. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.56457/jimk.v10i1.245>
- Bappedajabar. (n.d.). *Pemdaprov Jabar Targetkan PKB Naik 63 Persen pada 2020*. <http://bappeda.jabarpov.go.id/pemdaprov-jabar-targetkan-pkb-naik-63-persen-pada-2020/>
- detik.oto.com. (n.d.). *Lebih Mudah, Masih Banyak yang Bayar Pajak Kendaraan Lewat Biro Jasa*. Detikoto. <https://oto.detik.com/berita/d-5468908/lebih-mudah-masih-banyak-yang-bayar-pajak-kendaraan-lewat-biro-jasa>
- Ekonomi, F., & Andalas, U. (2019). *PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, AKUNTABILITAS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP*. 4(2).
- Ghozali. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Gunawan, R. (2020). Pengaruh Sistem E-Samsat Dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor. *Skripsi*, 141.
- Herawati, N., Hendri, N., & Darmayanti, E. F. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Metro. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 1-7. <https://doi.org/10.24127/exclusive.v1i2.2995>.

- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Indonesia, P. R. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta, 2003(1)*, 20–28.
- Indrayani, N. W., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12, 852–864.
- Lim, V. F., & Febriany, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(3), 43–61.
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Issue April).
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). ... Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi*, 14(November), 231–246. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538%0Ahttps://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538/2323>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- Saketi, V. D., Zanaria, Y., & Kurniawan, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 64 - 80. <https://doi.org/10.24127/exclusive.v1i2.3002>.
- Saragih, F. (n.d.). *PAJAK ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA)*. [www.Bisnis.com](http://www.Bisnis.com)
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4043. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p01>
- Sugiyono, P. D. (2019). No Title. In M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (Ed.), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Sukma, F. I. (2021). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 15 Nomor 2 , Agustus 2021 Hal 517-535 ISSN 2088-5008 PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan. 15(2)*, 517–535.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. *Universitas Pancasila Tegal*.